

MENGHAYATI PANCASILA SEBAGAI PENGGERAK INOVASI KAUM MUDA DALAM KEWIRAUSAHAAN KREATIF

Fritz Hotman S. Damanik¹, Dimas Qatrunnada²

¹) Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

²) SMA Swasta Harapan Mandiri

Abstrak

Sebagai sosok modern yang terbuka terhadap perubahan dan senantiasa bergairah demi mencapai kemajuan, kaum muda sesungguhnya memiliki potensi mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan beragam inovasi, baik material maupun sosial. Maka, dibutuhkan energi pendorong sekaligus pedoman guna memastikan agar inovasi berlangsung secara konsisten dan mampu membawa bangsa Indonesia semakin mendekati kearah kemakmuran, kesejahteraan, serta kemandirian sebagaimana dicita-citakan bersama. Untuk itu, Pancasila dapat direvitalisasi agar menjadi energi pendorong dan pedoman yang dibutuhkan kaum muda untuk mengulirkan kewirausahaan kreatif.

Kata kunci: pancasila, inovasi, kaum muda, kewirausahaan kreatif

PENDAHULUAN

Kaum muda dan inovasi dalam kewirausahaan kreatif. Sulit membayangkan bisa menyandingkan keduanya, terlebih di era modernisasi saat ini. Tak dapat dipungkiri, terlepas dari maraknya bermunculan inovator muda pada berbagai bidang, sebagian kaum muda justru tampaknya belum menganggap upaya penciptaan inovasi sebagai hal yang penting. Bagaimana tidak, berkembang pesatnya hedonisme dan konsumerisme telah menjadikan kegiatan bersenang-senang juga konsumsi barang maupun jasa demi kepentingan gaya hidup sebagai favorit bagi kaum muda. Sementara kegairahan untuk berinovasi yang jauh dari hingar-bingar urbanisme kian diabaikan dan dilupakan.

Dalam sebuah survei sederhana yang diadakan oleh OSIS SMA Harapan Mandiri, Medan pada Agustus 2019 terhadap 150 orang siswa, dari kelas X hingga XII, terungkap fakta bahwa mereka kebanyakan lebih menyukai menjadi pengguna atau konsumen dari beragam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (82%). Hanya sebagian kecil saja (18%) yang berniat mencari terobosan-terobosan baru atau berinovasi demi merintis kewirausahaan.

Ketika digali lebih mendalam lagi, diperoleh temuan yang cukup mengejutkan. Memang, hampir seluruh responden menyadari bahwa inovasi adalah suatu keniscayaan demi mencapai kemajuan (99,34%). Hanya segelintir saja (0,66%) yang merasa cukup menjadi pengguna atau konsumen saja dari beragam inovasi yang ditemukan inovator dari negara lain. Namun, ternyata tidak banyak yang berminat menekuni bidang-bidang terkait penciptaan inovasi kelak. Sebagian responden (82%) lebih memilih menjadi pegawai, baik negeri maupun swasta. Mayoritas responden (70%) juga beranggapan

bahwa kiprah sebagai inovator atau pun pelaku wirausaha belum menjanjikan kesejahteraan yang memadai di negeri ini.

Di sisi lain, nilai-nilai luhur Pancasila, yang seharusnya dijadikan pedoman dalam berinovasi, justru kian diabaikan. Tak pelak, pengabaian terhadap keluhuran Pancasila akhirnya merintang keghairahan berinovasi sebagai prasyarat mutlak bagi terwujudnya kemajuan. Sikap intoleran dan rentetan teror yang melanda, misalnya, telah berulang kali mengalihkan energi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) masyarakat. Energi yang seharusnya dicurahkan pada upaya penciptaan inovasi demi meningkatkan kualitas kehidupan terpaksa dialihkan demi memadamkan keresahan maupun rasa tidak aman. Sementara itu, maraknya tindak kekerasan tak jarang memunculkan stigma-stigma yang mempersulit jalinan kerja sama antar unsur dalam masyarakat.

Tak jarang munculnya inovasi justru ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Sebagai contoh, di sejumlah daerah, suatu jenis bibit unggul dinamakan sesuai nama partai politik atau petinginya, lantas diuji coba dan dipanen perdana sesuai agenda politik, namun ketika digunakan secara luas kebanyakan mengecewakan. Akibatnya, masyarakat menjadi trauma terhadap inovasi. Tak tertutup kemungkinan pula hal ini akhirnya menimbulkan perbenturan akibat perbedaan afiliasi politik.

Keengganan bermusyawarah acap pula mengakibatkan ragam inovasi tak terintegrasi dengan baik dan terkesan kurang menunjukkan keberpihakan pada kepentingan masyarakat umum. Akibatnya, inovasi demi inovasi belum kunjung mampu mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Oleh sebab itu, tak ada pilihan selain kembali menghayati Pancasila, menyemainya hingga mengakar disanubari kaum muda demi menggairahkan inovasi dalam kerangka kewirausahaan kreatif demi tercapainya kemajuan Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan pembahasan latar belakang di atas, dapat diambil pokok penting sebagai perumusan masalah yaitu, "Bagaimanakah penghayatan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila dapat mewujudkan sebagai penggerak inovasi kaum muda dalam mengembangkan kewirausahaan kreatif?"

KAJIAN PUSTAKA

Menghayati Hakikat Pancasila

Pancasila secara resmi diakui sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya, Pancasila pun serba hadir dalam kehidupan bernegara, antara lain:

1. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum atau norma fundamental negara (*groundnorms* atau *staatsfundamentalnorm*) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan sumber norma bagi UUD 1945 sebagai konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.
2. Pancasila adalah cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis. Cita hukum berarti gagasan, pikiran, rasa, dan cipta mengenai hukum yang seharusnya diinginkan masyarakat. Cita hukum mengarahkan hukum kepada cita-cita dari masyarakat bersangkutan.

Pancasila sebagai cita hukum memiliki dua fungsi, yakni:

- a. Fungsi regulatif, artinya menguji apakah hukum yang dibuat adil atau tidak bagi masyarakat.
- b. Fungsi konstitutif, artinya mengingatkan bahwa tanpa dasar cita hukum maka hukum yang dibuat akan kehilangan maknanya sebagai hukum.
3. Pancasila merupakan landasan dasar filosofi yang mengandung kaidah-kaidah dasar bagi pengaturan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih lanjut, misalnya menyangkut pembagian kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, serta hubungan negara dengan warganya.

Perubahan Sosial dan Inovasi

Menurut Samuel Koenig (dalam Setiadi, 2011), perubahan sosial merujuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi dimaksud terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern. Perubahan sosial merupakan gejala yang melekat (inheren) pada setiap masyarakat. Tidak ada satu masyarakat pun yang tidak mengalami perubahan. Perubahan sosial merupakan gejala umum yang terjadi sepanjang masa dalam setiap masyarakat. Perubahan itu terjadi sesuai dengan hakekat dan sifat dasar manusia yang selalu tidak puas dan ingin mengadakan perubahan.

Secara umum, proses perubahan sosial berlangsung dalam tiga tahap yang berurutan, yaitu:

1. Inovasi

Yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Inovasi juga seringkali disebut sebagai suatu kombinasi baru atau cara penggunaan baru dari pengetahuan yang sudah ada. Inovasi mencakup serangkaian modifikasi, pengembangan, kombinasi ulang (rekombinasi) yang tanpa akhir. Inovasi dapat dibedakan atas:

Inovasi material, yaitu pengembangan yang bersifat kebendaan, seperti penemuan telepon genggam (sebagai hasil modifikasi dari telepon *fixed line*), pesawat supersonik (sebagai hasil pengembangan dari pesawat terbang konvensional), dan sebagainya.

Inovasi sosial, yakni pengembangan yang bersifat sosial ataupun kelembagaan, misalnya munculnya pemerintahan konstitusional (sebagai hasil modifikasi dari monarki), perusahaan terbuka yang sahamnya dimiliki publik (sebagai hasil modifikasi dari perusahaan yang dikelola oleh keluarga), dan sebagainya.

2. Difusi

Ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Suatu inovasi takkan bermanfaat dan diketahui oleh banyak orang bila tidak disebarkan dari suatu kelompok ke kelompok lainnya (difusi).

3. Konsekuensi

Yakni perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Perubahan terjadi jika pengadopsian atau penolakan ide baru itu mempunyai akibat.

Keberadaan Kaum Muda dan Tantangannya

Apakah yang dimaksud dengan kaum muda (atau pemuda)? Mengenai hal ini, banyak definisi dapat diacu. Dalam Statistik Kepemudaan Tahun 2015 yang disusun oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga RI, misalnya, konsep ‘pemuda’ dibatasi sebagai individu pada rentang usia 16-30 tahun. Ditambahkan juga bahwa jumlah pemuda mencapai sekitar 57,81 juta jiwa atau 25,04 persen dari penduduk Indonesia yang berjumlah 230,87 juta jiwa. Sementara WHO (World Health Organization) menyebut individu berusia 10-24 tahun sebagai pemuda atau orang muda. Sedangkan individu dalam golongan usia 10-19 tahun disebut remaja. Perlu diingat, pemuda di sini merupakan sebuah konsep yang tidak mengacu pada jenis kelamin tertentu (neuter gender).

Menurut George Herbert Mead (dalam Sunarto, 2008), pemuda atau kaum muda, sesuai taraf usianya, adalah individu yang sudah memahami dengan baik mengenai peran yang harus dijalankannya, dan telah pula mengetahui peran yang semestinya dilakukan oleh orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Ia juga mampu mempelajari peran majemuk dan menyesuaikan diri dengan banyak peran sesuai ragam kedudukan (status) yang dimiliki. Jika seseorang sudah mencapai tahap ini, maka ia dapat dikatakan sudah memiliki suatu diri.

Sosok pemuda acap pula diidentikkan dengan keterbukaan terhadap pengalaman baru (*openess to experience*), mencoba hal-hal baru serta menemukan gagasan-gagasan baru. Pemuda diasumsikan mempunyai rasa dan daya imajinasi yang kuat dalam mengaktualisasikan diri demi mengembangkan kapasitas intelektual, daya kreasi, dan bakat secara maksimal. Mereka ini akan tetap menghargai tradisi, sambil membuka diri terhadap nilai-nilai modern.

Dari sejumlah definisi dan pendapat para ahli mengenai pemuda, jelas kiranya betapa pemuda dengan segenap keberadaannya siap mengambil peran dalam masyarakat, bergairah mencipta beragam inovasi, serta mampu bersikap kritis dan terbuka demi meningkatkan daya saing menuju kemajuan seutuhnya.

Sejatinya, memang sungguh banyak harapan dan keyakinan ditumpukan pada para pemuda. Ir. Soekarno, pendiri dan proklamator kemerdekaan Indonesia, pernah berucap, “Berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku satu pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.” Pada kesempatan lain, ia kembali mengulangi keyakinan tersebut dalam ungkapan yang tak jauh berbeda maknanya, “Seribu orang tua hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah dunia.”

METODE PENELITIAN

Dalam proses pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai upaya untuk mendapatkan atau memperoleh informasi yang diperlukan dan memastikannya terjaring sebaik mungkin. Adapun teknik yang digunakan oleh penulis adalah (1) Metode observasi yang dimaksudkan untuk mengamati suatu gejala sosial tertentu, yakni realitas kehidupan kaum muda; (2) Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang menyangkut dengan masalah yang ditulis melalui penelusuran pustaka dan sumber sekunder lainnya.

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya dibaca, dipelajari, ditelaah, serta direduksi guna memperoleh rangkuman inti dari data. Tahap akhir ialah melakukan

interpretasi terhadap data, hingga sampai pada konsep-konsep pemecahan masalah secara tuntas dan menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sejak kemerdekaan hingga kini, pelaksanaan Pancasila selalu mengalami berbagai macam hambatan, khususnya karena adanya proses dan dinamika politik yang memanipulasi Pancasila demi kekuasaan dengan mengingkari nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Semasa Orde Lama, Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa sempat dikeramatkan dengan sebutan ‘azimat revolusi bangsa’. Namun, seiring bergulirnya waktu, keutamaan nilai-nilai luhur Pancasila lumat oleh serangkaian proses akumulasi kekuasaan yang sangat agresif. Pancasila akhirnya hanya menjadi untaian kalimat indah yang harus menundukkan diri pada ambisi revolusi serta kepentingan politik. Pancasila acapkali digunakan oleh oknum penguasa untuk membuai rakyatnya agar melupakan penderitaan akibat deraan beragam masalah.

Setelah berakhirnya rezim Orde Lama, muncullah kekuatan baru dengan tekad awal melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Semangat tersebut muncul berdasarkan pengalaman sejarah dari pemerintahan sebelumnya yang telah menyelewengkan Pancasila serta menyalahgunakan UUD 1945 untuk kepentingan kekuasaan. Sayangnya, sejalan dengan kian dominannya kekuatan negara, nasib Pancasila akhirnya tidak banyak berbeda bila dibandingkan dengan semasa Orde Lama.

Pendidikan Pancasila yang dikemas dalam penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) atau sejenisnya, ternyata justru menjauhkan generasi muda dari pemaknaan utuh terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Hal mana terutama disebabkan karena Pendidikan Pancasila yang bersifat doktriner tidak pernah disertai keteladanan sejati. Banyak elite politik yang gemar berpidato dengan ‘dibumbui’ Pancasila justru bersikap dan berperilaku menyalahi keluhuran Pancasila. Tak pelak, ini menimbulkan persepsi buruk masyarakat sekaligus meredupnya Pancasila sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Era Reformasi lantas mulai bergulir seiring kejatuhan rezim Orde Baru. Banyak pihak mulai menyadari betapa menganganya kesenjangan antara nilai-nilai Pancasila sebagaimana terkandung dalam kelima Sila dengan kenyataan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengabaian serta penyimpangan dari Pancasila telah dipahami sebagai akar penyebab beragam problematika yang teramat pelik, termasuk merintangai tumbuh dan berkembangnya kegairahan berinovasi menuju terwujudnya kemajuan sejati. Oleh sebab itu, dipandang tepat jika kembali berupaya menghayati kembali keluhuran Pancasila. Dalam hal ini, kaum muda hendaknya mampu mengambil langkah awal bermakna.

Sebagai sosok modern yang terbuka terhadap perubahan dan senantiasa bergairah demi mencapai kemajuan, kaum muda sesungguhnya memiliki potensi mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan beragam inovasi, baik material maupun sosial. Maka, dibutuhkan energi pendorong sekaligus pedoman guna memastikan agar inovasi berlangsung secara konsisten dan mampu membawa bangsa Indonesia semakin mendekat ke arah kemakmuran, kesejahteraan, serta kemandirian sebagaimana dicita-citakan bersama. Untuk itu, Pancasila dapat direvitalisasi agar menjadi energi pendorong dan

pedoman yang dibutuhkan kaum muda untuk menggulirkan kewirausahaan kreatif yang bercirikan adanya keingintahuan tentang berbagai hal, sikap optimis, fleksibilitas atau kelenturan, giat mencari solusi dari tiap permasalahan, orisinal, sekaligus gemar berimajinasi (Lestari, 2012).

Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersirat kepercayaan dan ketaqwaan dari segenap bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, dalam berinovasi, kaum muda hendaknya selalu menjiwai ketentuanNya sebagai roh perubahan. Dalam ajaran Islam, secara umum, setiap umat Islam wajib mendukung kebaikan dan menegakkan kebenaran (*amar ma'ruf nahi munkar*). Inovasi, selama bertujuan mencapai kemajuan, jelas merupakan hal baik, sehingga layak didukung.

Lebih jauh lagi, bekerja dan berinovasi demi memastikan terpenuhinya kebutuhan yang memadai (*al-had al kifayah*) serta memakmurkan (*al-'imarah*) masyarakat merupakan kewajiban sakral (*fardun muqaddas*). Terdapat sejumlah ayat dan hadist yang mendasari pendapat ini, antara lain, perintah *al-masyuu fi manakib al-ardh* (berjalan di muka bumi untuk mencari rizki), *al-ibtiga' min fadlillah* (mencari rizki Allah), talab al-kasb (mencari pekerjaan), juga *al-jihad fi sabilillah* (berjihad di jalan Allah).

Terkait upaya menumbuhkembangkan semangat kewirausahaan kreatif, sungguh tepat jika melakukannya dengan berlandaskan hadist Nabi Muhammad SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Anas R.A, "Seorang yang berusaha mencari kebutuhan pokok dan tidak meminta-minta pada orang lain, Allah SWT takkan mengazabnya pada hari kiamat. Dan seorang hamba yang berusaha dengan tangannya sendiri sangat disukai oleh Allah SWT." Dari hadist tersebut, jelas bahwa kemandirian, sebagai roh dari kewirausahaan, teramat bernilai bagi Allah SWT.

Apakah sesungguhnya yang menjadi modal dasar dari ekonomi (wirausaha) kreatif? Di antaranya adalah kreativitas yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah Allah SWT. Sebagaimana termuat dalam Al-Qur'an bahwa manusia adalah makhluk unik (*khalqan akhar*). "... Kemudian Kami jadikan dia (manusia) makhluk yang unik. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik." (QS. Al Mu'min [23]: 12-14). Keunikan inilah yang lantas mewujudkan menjadi kreativitas.

Allah SWT mengingatkan pula kepada umatNya bahwa tidak ada batasan dalam berinovasi, sepanjang tak bertentangan dengan ketetapanNya. Sebagaimana termuat dalam QS Ar-Rahman: 33, "Hai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan." Adapun wujud konkret dukungan Allah SWT terhadap inovasi bisa dicermati pada QS Al-Anbiya: 80, "Telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu guna memelihara diri dalam peperanganmu."

Ajaran Kristen pun meniscayakan adanya perubahan dan inovasi yang dimaksudkan sebagai wujud kasih terhadap sesama manusia. Sebagaimana digariskan oleh Hukum Kasih, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini senada dengan ajaran Buddha yang mengingatkan agar segala perbuatan, termasuk bekerja serta berinovasi, haruslah mampu memancarkan metta (kasih sayang dan cinta kasih) kepada semua makhluk tanpa pengecualian. Sementara itu, ajaran Hindu tak luput pula memberi dukungan pada inovasi berkelanjutan, "Wahai manusia, seperti kapal yang dibuat oleh para ahli untuk mudah menyeberangi lautan demikian pula buatlah dengan angin dan

energi sehingga mampu melewati jalan dengan kapal dan pesawat tersebut, Oleh karena itu ciptakanlah beraneka jenis lalu lintas udara dan laut, sehingga mampu mengunjungi satu tempat ke tempat yang lain.” (Rgveda 1.46.7)

Setelah mampu menghayati ajaran agama masing-masing sebagai pendorong inovasi, selanjutnya kaum muda perlu mengembangkan nilai universalisme agar dapat berinovasi dan bekerja bersama siapa pun disertai kesediaan memandang yang lain dengan penghargaan, tanpa saling memaksakan kehendak, keyakinan, atau kepercayaan sendiri. Dengan demikian, takkan terjadi konflik yang merintang ke arah berinovasi menuju kemajuan.

Dalam pengembangan nilai universalisme, pendidikan multireligius berbasis Pancasila menjadi sangat strategis. Awalnya, individu dibimbing untuk mengenal, menghormati, dan menghargai ajaran agama serta keyakinannya sendiri (termasuk praktek keberagaman, seperti tata cara ibadah, kewajiban sebagai pemeluk agama, dan sebagainya). Sesuai tahap perkembangan individu, pengenalan dan penghormatan atas diri sendiri diperluas mencakup pengenalan dan penghargaan terhadap individu berbeda agama. Misalnya, pengenalan tentang kebenaran yang juga dimiliki oleh agama lain serta nilai-nilai kebaikan universal dalam ajaran semua agama.

Sila Kedua: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sementara itu, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menyiratkan pentingnya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka, tentunya dibutuhkan inovasi sosial berwujud perubahan perilaku. Salah satunya adalah dengan berupaya mengenyahkan segala bentuk tindak kekerasan dari keseharian kaum muda. Kekerasan yang dimaksud dapat bersifat fisik (menyakiti fisik seperti menampar, memukul, melukai, mencederai), psikologis (mengancam, menghina, mencaci, dan mengisolasi korban dari kontak sosial), ekonomi (memeras, menghalangi aktivitas ekonomi korban), maupun seksual (pelecehan, pencabulan, atau pemerkosaan).

Demi mengenyahkan tindak kekerasan, inovasi dapat dilakukan dengan membelokkan arah komunitas sebaya atau geng yang lazimnya bercorak kekerasan (pelaku tawuran atau perkelahian) menjadi kelompok pendukung (*support group*) bagi kegiatan positif kaum muda, misalnya merintis kewirausahaan kreatif. Di sini, masing-masing anggota kelompok harus bisa memberikan dukungan yang positif terhadap anggotanya, bukan malah saling memojokkan atau mendorong melakukan perilaku menyimpang. Berikan semangat bagi yang melakukan kegagalan agar bisa membenahi diri, karena kegagalan hanyalah kerikil-kerikil kecil dalam perjalanan menuju keberhasilan. Berikan apresiasi tulus kepada yang berhasil melakukan kebaikan, sekecil apa pun itu.

Jika selama ini komunitas sebaya (geng) selalu memberikan dukungan kepada anggotanya agar melakukan hal-hal negatif dan menganggap hebat anggotanya yang mampu menyelesaikan tantangan ‘konyol’ dan ‘bodoh’, kini saatnya mengubah semuanya. Dukungan selayaknya diberikan pada kegigihan berinovasi atau pun ketekunan merintis kewirausahaan kreatif. Yang perlu diingat bahwa dukungan positif tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga bagi diri sendiri karena memungkinkan adanya perenungan berkelanjutan demi membangkitkan motivasi.

Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Adapun Sila Persatuan Indonesia mengingatkan setiap warga negara agar bersedia memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimanakah pergaulan dapat dimanfaatkan untuk mendukung inovasi ? Inovasi tak pernah datang begitu saja. Inovasi lazimnya diawali keingintahuan atau ketidakpuasan, upaya mencari jawaban atau pemecahan, pengumpulan sumber daya demi memulai inovasi sebagai jawaban atau pemecahan, lantas diakhiri dengan menyebarluaskan inovasi agar diketahui serta nantinya dapat dimanfaatkan oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat. Dalam pengumpulan sumber daya serta upaya menyebarluaskan inilah pergaulan menjadi sangat penting.

Dengan pergaulan dan jejaring sosial yang luas, takkan sulit bagi seorang inovator untuk menghimpun sumber daya yang dibutuhkannya. Jejaring sosial pada gilirannya juga dapat menumbuhkan rasa percaya, saling memahami, saling mendukung, juga kesamaan nilai, sehingga turut mendukung ditemukannya inovasi serta terobosan-terobosan baru. Ketika inovasi telah mewujudkan, jejaring sosial kembali bisa dimanfaatkan sebagai media penyebarluasannya.

Pada fase informasi, pergaulan dapat dijalin melalui media sosial (social media), baik berwujud jejaring sosial (Facebook, myspace, hi5, LinkedIn, bebo), diskusi (google talk, yahoo! M, skype, phorum), berbagi (youtube, slideshare, feedback, flickr, crowdstorm), publikasi (wordpress, wikipedia, blog, wikia, digg), maupun mikroblog (twitter, plurk, pownce, twixtr, plazes, tweetpeek) demi mendukung penciptaan inovasi.

Secara konkret, misalnya, media sosial dapat diarahkan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan kreatif melalui penyebarluasan modul-modul kewirausahaan atau peluang pengembangan komoditas ekonomi kreatif, tips sukses wirausaha kreatif, motivasi pengembangan usaha, pembentukan selera konsumen, atau pun perluasan pemasaran produk. Tak bisa dipungkiri, kewirausahaan memang perlu terus diperkenalkan, dipromosikan, dan dipelajari oleh siapa pun, terutama generasi muda. Terlebih mengingat generasi muda tidak dibesarkan dalam budaya wirausaha, sehingga ketika dewasa memiliki pola pikir sebagai pencari kerja dan bukan pencipta lapangan kerja.

Lebih jauh lagi, media sosial bisa pula dimanfaatkan demi mensosialisasikan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Melalui penyediaan plafon kredit tertentu, program ini diyakini mampu mendukung pengembangan kewirausahaan kreatif yang memiliki prospek bisnis menjanjikan dan kemampuan untuk mengembalikan, tapi dianggap belum *bankable* (memenuhi persyaratan kredit atau pembiayaan bank). Bagaimana pun, kemajuan kewirausahaan kreatif yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, sekaligus bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan memberdayakan daya kreasi juga daya cipta individu, saat ini, diyakini dapat memberikan kontribusi bermakna bagi kemajuan bersama.

Bertolak dari kesadaran terhadap besarnya potensi pengembangan ekonomi (kewirausahaan) kreatif, terutama untuk menyaingi rendahnya pertumbuhan ekonomi pasca krisis (rata-rata hanya 4,5% per tahun), tingginya tingkat kemiskinan (16-17%), dan rendahnya daya saing industri di Indonesia, pemerintah pun telah merumuskan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam diktum kedua instruksi ini, kepada seluruh jajaran Kabinet diinstruksikan agar saling berkoordinasi mengembangkan ekonomi kreatif yang mencakup periklanan; arsitektur; pasar seni dan barang antik; kerajinan; desain; mode

(fashion); film, video, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; radio dan televisi; serta riset dan pengembangan. Di seluruh sektor tersebut, beragam media sosial dapat diberdayakan secara maksimal sesuai kebutuhan para pelaku kewirausahaan kreatif.

Upaya mengembangkan kewirausahaan kreatif sejatinya dapat juga dimaknai sebagai wujud nyata kecintaan pada Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran pada Februari 2013 mencapai 6,7 juta jiwa. Kondisi tersebut kian diperparah lagi dengan adanya gangguan terhadap iklim investasi (akibat demonstrasi buruh maupun praktek pungutan liar), ketidakpastian hukum, hingga kekerasan yang dialami oleh TKI di sejumlah negara. Dalam hal ini, tumbuh dan berkembangnya wirausaha mandiri akan menciptakan jutaan lapangan kerja sehingga menghindarkan ancaman kerawanan sosial akibat tingginya jumlah pengangguran yang berpotensi mengancam integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah sebabnya kaum muda yang mengaku mencintai negerinya sudah selayaknya berupaya merintis kewirausahaan kreatif, demi kemandirian bangsa.

Selain itu, Sila Persatuan Indonesia menghendaki tiap warga negara untuk mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Ini dapat dilakukan dengan bergiat menggali beragam kearifan lokal dari sepenjuru Indonesia demi mendorong kegairahan berwirausaha. Kearifan lokal Jawa Barat, misalnya, mengingatkan semua orang untuk senantiasa berpikir dan berusaha untuk memenuhi keperluan sandang, pangan, serta papan (kudu ngakal, ambeh ngakeul). Ikhtiar demi mencapai kemandirian juga kemajuan seharusnya dilakukan secara seksama dan tidak berlebihan (ka hareup ngala sajeujeuh).

Sedangkan menurut kearifan lokal Batak, kewirausahaan kreatif diyakini akan mendatangkan kekayaan (*hamoraon*) dan kemuliaan (*hasangapon*) demi mencapai kemajuan (*hamajuon*) masyarakat. Perlu diingat, bahwa semuanya harus tetap bersendikan pada hukum, aturan, serta norma yang berlaku (*patik dohot ukum*).

Pada akhirnya, kearifan lokal Jawa mengingatkan agar manusia tak henti mengupayakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan (*memayu hayuning bawana*), misalnya melalui kewirausahaan kreatif. Jangan tergiur oleh kemewahan (*aja milik barang kang melok*) serta selalu menahan diri sebab keberhasilan tak mungkin diraih dalam sekejap. Bahkan ketika keberhasilan telah berada di genggaman pun, manusia diingatkan agar tidak terkungkung oleh hasrat keduniawian (*aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan lan kemareman*). Hidup dan segala yang kita miliki semestinya diarahkan guna memberi manfaat sebesar-besarnya bagi orang lain (*urip iku kudu urup*).

Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Berlanjut kemudian pada Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang menghendaki agar setiap warga negara mengutamakan musyawarah ketika hendak mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Musyawarah demi mencapai mufakat pun haruslah senantiasa diliputi oleh semangat kekeluargaan. Acap terjadi, penciptaan inovasi tak dapat dilakukan oleh segelintir inovator saja, sehingga membutuhkan kerja sama atau permusyawaratan dengan inovator lain dari berbagai bidang ilmu agar inovasi yang dihasilkan dapat

berdaya guna tinggi. Ketika itulah, ego harus disingkirkan dan perbedaan pendapat pun mesti dicari titik temunya.

Seorang inovator dituntut pula untuk mampu menghasilkan beragam inovasi sesuai dengan aspirasi maupun kebutuhan masyarakat, sekaligus mendukung terwujudnya kemandirian. Seorang inovator tidak boleh memaksakan kehendak atau bersikap seolah-olah paling memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika terdapat kontroversi (perdebatan) terkait suatu inovasi, hendaknya dapat dimusyawarahkan dengan akal sehat, sesuai hati nurani yang luhur.

Sungguh tepat juga kiranya jika diterjunkan barisan Kader Penggiat Wirausaha Kreatif, terdiri dari para pelaku kewirausahaan kreatif, yang diharapkan mampu menyadarkan siapa pun bahwa untuk memperoleh peluang maka haruslah memiliki berbagai kemampuan dan pengetahuan (Manurung, 2013) seperti :

1. Kemampuan untuk menghasilkan produk atau jasa baru.
2. Menghasilkan nilai tambah baru.
3. Merintis usaha baru.
4. Melakukan proses atau teknik baru.
5. Mengembangkan organisasi baru.

Tak hanya itu, Kader Penggiat Wirausaha Kreatif mesti mampu pula menanamkan pemahaman bahwa demi menjadi wirausahawan sejati kelak, individu dituntut jeli melihat sesuatu dalam perspektif atau dimensi yang berbeda dengan kebanyakan orang lainnya. Kala merintis wirausahanya, individu tak jarang mesti sigap melakukan beberapa hal sekaligus (*multi-tasking*). Wirausahawan bijak juga harus mengerti bahwa membangun sebuah wirausaha kreatif yang kokoh dan mapan memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan belasan atau puluhan tahun. Selama itu pula, keuntungan sesedikit mungkin digunakan untuk keperluan konsumtif, agar dapat disisihkan guna bertahan pada masa sulit atau pun perluasan usaha.

Sila Kelima: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila terakhir Pancasila adalah Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Salah satu perilaku yang dituntut oleh sila ini adalah suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Hal dimaksud tentunya, antara lain, dimungkinkan melalui inovasi kaum muda dalam mengembangkan kewirausahaan kreatif demi mendukung strategi pengentasan kemiskinan. Tak dapat disangkal bahwa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan selama ini masih memperlihatkan sejumlah kekeliruan mendasar. Kekeliruan pertama adalah bahwa kebanyakan program penanggulangan kemiskinan lebih bercorak karitatif (kemurahan hati) ketimbang memupuk produktivitas. Itulah sebabnya, sulit mengharapkan munculnya inisiatif dari penduduk miskin untuk berupaya mengatasi kemiskinannya secara mandiri. Sebaliknya, mereka akan selalu menggantungkan diri pada bantuan yang diberikan pihak lain. Adapun kekeliruan kedua ialah sebagian program penanggulangan kemiskinan masih memosisikan penduduk miskin sebagai obyek dan bukan subyek.

Mencermati sejumlah kekeliruan tersebut, kaum muda hendaknya jeli berinovasi, baik melalui organisasi kepemudaan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), untuk merumuskan program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan agar penduduk miskin menjadi produktif sehingga perlahan mampu mengembangkan kemandirian. Penduduk miskin diberdayakan agar mampu menjadi subyek, yakni pelaku perubahan

yang aktif terlibat menanggulangi kemiskinannya, sekaligus mengerahkan segenap potensi selaku aktor sosial berdaya.

SIMPULAN

Sebagai sosok modern yang terbuka terhadap perubahan dan senantiasa bergairah demi mencapai kemajuan, kaum muda sesungguhnya memiliki potensi mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan beragam inovasi, baik material maupun sosial. Untuk itu, Pancasila dapat direvitalisasi agar menjadi energi pendorong dan pedoman yang dibutuhkan kaum muda.

Pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa tersirat kepercayaan dan ketaqwaan dari segenap bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, dalam berinovasi, kaum muda hendaknya selalu menjiwai ketentuanNya sebagai roh perubahan.

Sementara itu, Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menyiratkan pentingnya mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Maka, tentunya dibutuhkan inovasi sosial berwujud perubahan perilaku. Dukungan selayaknya diberikan pada upaya pencapaian prestasi, inovasi, atau kemajuan.

Adapun Sila Persatuan Indonesia mengingatkan setiap warga negara agar bersedia memajukan pergaulan pengembangan kewirausahaan kreatif menuju kemajuan bangsa. Upaya mengembangkan kewirausahaan kreatif sejatinya dapat juga dimaknai sebagai wujud nyata kecintaan pada Indonesia.

Berlanjut kemudian pada Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang menghendaki agar setiap warga negara mengutamakan musyawarah ketika hendak mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Acap terjadi, penciptaan inovasi tak dapat dilakukan oleh segelintir inovator saja, sehingga membutuhkan kerja sama atau permusyawaratan dengan inovator lain dari berbagai bidang ilmu agar inovasi yang dihasilkan dapat berdaya guna tinggi.

Sila terakhir Pancasila adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Salah satu perilaku yang dituntut oleh sila ini adalah suka memberikan pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Hal dimaksud tentunya, antara lain, dimungkinkan melalui inovasi kaum muda dalam pengembangan kewirausahaan kreatif demi mendukung pengentasan kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryani, I. K. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Bustami, B. (2008). *Mari Membangun Usaha Mandiri!!: Pedoman Praktis Bagi UKM*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lestari, F. (2012), Pengaruh Jiwa Kewirausahaan dan Kreativitas Terhadap Keberhasilan Usaha Pada Sentra Industri Rajutan Binong Jati Bandung. *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*. 2 (1): 75-86.
- Manurung, H. (2013), Peluang Kewirausahaan Sekolah Melalui Kreativitas dan Inovasi. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan*. 1 (1): 80-119.

- Putra, R. Masri Sareb (ed.). 2010, *Etika dan Tertib Hidup Berwarga negara*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Setiadi, E. M. (2011). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Kencana.
- Sutrisno, S. (2006). *Filsafat dan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syarbaini, S. (2010). *Implementasi Pancasila melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Ujan, A. A. (2011). *Multikultural: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: Penerbit PT Indeks.



THE
Character Building
UNIVERSITY